

PENGARUH E-PROCUREMENT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI PADA UKPBJ SETDA KOTA GUNUNGSITOLI)

Danieli Mendrofa¹, Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea², Maria Magdalena Bate'e³, Serniati Zebua⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

danielmend3@gmail.com¹, jeliswan89@gmail.com², maria.batee82@gmail.com³, sernizebua97@gmail.com⁴

Info Artikel

Diterima :

Tgl 29 April 2024

Revisi :

Tgl 21 Mei 2024

Terbit :

Tgl 19 Juni 2024

Key words:

e-procurement and effectiveness of goods/services procurement

Kata Kunci:

e-procurement dan efektivitas pengadaan barang/jasa

Corresponding

Author :

Danieli Mendrofa¹,
Jeliswan Berkat
Iman Jaya Gea²,
Maria Magdalena
Bate'e³, Serniati
Zebua⁴

danielmend3@gmail.com¹,
jeliswan89@gmail.com²,
maria.batee82@gmail.com³,
sernizebua97@gmail.com⁴

Abstract

One of the public services that utilizes the e-government system to achieve good governance in Indonesian Government agencies is services in the procurement of government goods / services. Procurement of goods and services carried out by the government is very instrumental in the success of national development in order to improve public services in various regions, specifically in the Gunungsitoli City Government. The purpose of this study is to determine whether there is an effect of e-procurement; to find out how significant the effect of e-procurement; and to find out how the effect of e-procurement on the effectiveness of the procurement of goods and services at UKPBJ SETDA Gunungsitoli City. This research was conducted using quantitative research methods, to see and statistically assess how e-procurement influences the effectiveness of the procurement of goods / services, whose data collection was carried out through distributing closed questionnaires and the results were processed through SPSS 22. Based on the results of research that has been carried out by conducting hypothesis testing through the t test (partial), the results obtained $t_{count} (5.651) > t_{table} (1.6794)$ with a significance value of $0.000 < 0.005$, which means that there is an influence of e-procurement on the effectiveness of government procurement of goods / services at UKPBJ Gunungsitoli City.

Abstrak

Salah satu pelayanan publik yang memanfaatkan sistem *e-government* untuk mencapai *good governance* di instansi Pemerintah Indonesia yaitu pelayanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah, secara khusus di Pemerintahan Kota Gunungsitoli. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh *e-procurement*; untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh *e-procurement*; untuk mengetahui bagaimana pengaruh *e-procurement* terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, untuk melihat dan menilai secara statistik bagaimana pengaruh *e-procurement* terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran angket tertutup dan hasilnya diolah melalui SPSS 22. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan uji hipotesis melalui uji t (parsial) diperoleh hasil $t_{hitung} (5.651) > t_{tabel} (1.6794)$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.005$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh *e-procurement* terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah pada UKPBJ Kota Gunungsitoli.

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik atau sering disebut dengan istilah *good governance*, maka diperlukan satu konsep yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, *good governance* didefinisikan sebagai suatu pengembangan serta penetapan pemerintah mengenai prinsip profesional, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi, demokrasi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan agar dapat mencegah serta mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu pelayanan publik yang memanfaatkan sistem *e-government* untuk mencapai *good governance* di instansi Pemerintah Indonesia yaitu pelayanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pesat yang disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan turut meningkat, baik secara materiil maupun non materiil, yang semuanya terwakili melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah (Iqbal M, 2020).

Pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan yang memadai dan mencapai tujuan pelayanan publik melalui penyediaan sistem informasi, alat-alat medis, pendidikan, maupun infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Tahun 2010, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-tendering* atau *e-purchasing*. Pengadaan secara elektronik atau sering disebut *e-Procurement* ini, diperlukan agar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.

Penerapan *e-procurement* ini akan mempermudah dan mempercepat proses administrasi sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. sepanjang penerapan sistem elektronik ini, ada beberapa masalah yang timbul diantaranya ada penyedia barang/jasa yang belum menguasai penggunaan sistem

elektronik dan tidak terlalu memahami proses pengadaan barang/jasa yang dapat menghambat kegiatan, sedangkan sesuai harapan awal penciptaan *e-procurement* ini diharapkan dapat membantu mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih efektif dalam proses pengadaan barang daripada melalui cara konvensional. Saat *e-procurement* ini digunakan untuk proses pengadaan barang/jasa, yang sering bermasalah adalah server error bahkan bisa sampai mati yang dapat menghambat dan memperlambat pelaksanaan tender dan juga sistem komputer untuk *e-Procurement* sering macet di saat menjelang deadline tender. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas keberhasilan serta kepuasan antar pihak terkait dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh *e-procurement* terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli?
2. Seberapa signifikan pengaruh e-procurement terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli?

Tinjauan Pustaka

a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada Bab I pasal I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa." Menurut Sutedi (2012) dalam Suprianto (2019), bahwa pengadaan barang/jasa merupakan sebuah proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.

b. E-Procurement

Electronic Government Procurement yang disingkat *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik ini merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet dan intranet). Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

c. Metode Pelaksanaan E-Procurement

- i. *e-Tendering* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang diikuti oleh penyedia barang/ jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran.
- ii. *e-Bidding* adalah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa.
- iii. *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa.
- iv. *e-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. Pengguna barang/ jasa cukup hanya memilih barang/ jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka dan transparan.

d. Indikator e-Procurement

Keberhasilan penerapan pelaksanaan e-procurement menurut Suchyo dalam Novitasari dan Indri (2019), dapat ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

- i. *Leadership*/Kepemimpinan
- ii. Transformasi pola pikir dan pola tindak
- iii. Sumber daya manusia (SDM)
- iv. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas

e. Efektivitas

Ulum dalam Tanesia (2018) menyatakan bahwa efektivitas bukan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan, namun untuk melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 107, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara dapat dikatakan efektif apabila tujuannya telah tercapai. Adapaun yang menjadi tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
 4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
 5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
- f. Hipotesis
- H_a: Ada pengaruh e-procurement terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli.
- H₀: Tidak ada pengaruh e-procurement terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Kausal/Prediksi. Menurut Ghozali (2016:90) penelitian kausal adalah jantungnya metode penelitian kuantitatif, dengan menguji apakah ada atau tidak satu variabel mempengaruhi perubahan variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah e-Procurement. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis angket/kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angket tertutup, dimana pemilihan jawaban dalam kuesioner menggunakan skala likert.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dan pihak penyedia barang dan jasa sebanyak 47 orang. Menurut Arikunto (2017:104) jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil secara keseluruhan. Oleh karena populasi dalam penelitian ini dibawah 100 orang, maka semua populasi akan digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 47 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Angket (*kuesioner*) tertutup, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengedarkan angket/*kuesioner* kepada responden. Jawaban respon atas angket yang telah diedarkan oleh peneliti, diolah dan di analisis dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22 untuk dilakukan pengujian analisis jalur dan korelasi.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka dilakukan uji hipotesis melalui uji t. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah melalui serangkaian pengolahan data penelitian melalui aplikasi SPSS 22, yaitu untuk

melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik melalui uji normalitas data; uji autokorelasi; uji heterokedastisitas, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinan; dan regresi linear sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Reliabilitas

Melalui uji yang dilakukan Dengan menggunakan analisis reliabilitas *Cronbach's Alpha*, diperoleh bahwa hasil dari *Cronbach's Alpha* dari variabel X (*e-Procurement*) adalah sebesar 0,779. Maka variabel X dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6; dan hasil dari *Cronbach's Alpha* untuk Variabel Y (Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah 0,860, dan dinyatakan reliabel karena lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

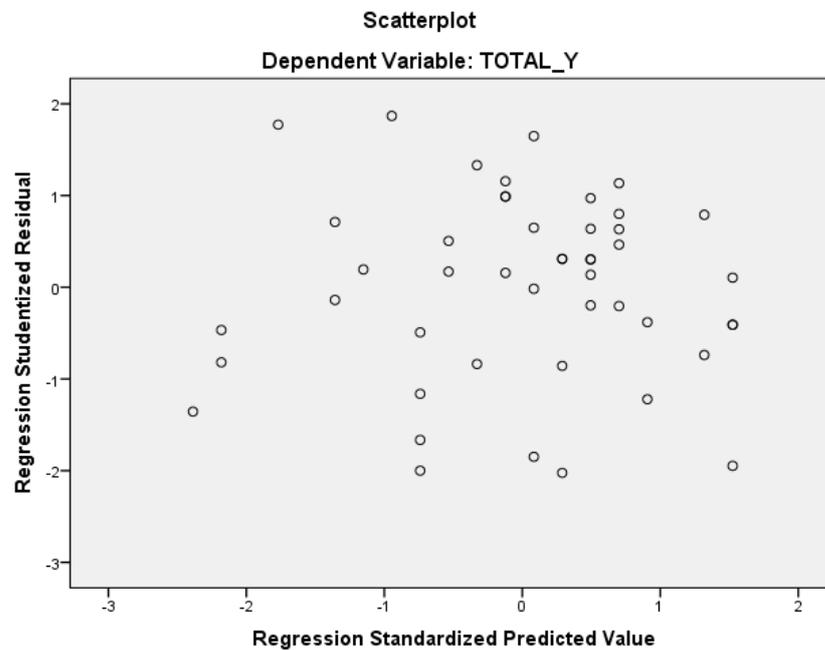
1. Uji Normalitas; hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*, menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari ketentuan 0,05, yang mana dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan persyaratan normalitas dalam model regresi terpenuhi.
2. Uji Autokorelasi; dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan Run Test. Tabel berikut menunjukkan hasil uji autokorelasi yang dihasilkan melalui SPSS 22:

Tabel 1. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.93938
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	24
Total Cases	47
Number of Runs	16
Z	-2.358
Asymp. Sig. (2-tailed)	.018

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan SPSS 22 (2024)

3. Hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah. Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa pola titik-titiknya menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi melalui SPSS 22 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2 *Square*) sebesar 0,415 artinya bahwa 41,5% nilai variabel X (e-procurement) yang dapat di jelaskan, sedangkan sisanya sebesar 58,8% tidak dapat dijelaskan.

Tabel 2. Hasil Uji Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.644 ^a	.415	.402	6.070
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X (e-Procurement)				
b. Dependent Variable: TOTAL_Y (efektivitas pengadaan barang/jasa)				

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan SPSS 22 (2024)

Hasil Uji Hipotesis

Dengan berpedoman pada ketentuan nilai uji signifikansi bahwa $sig. < 0,05$, maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui uji t nilai signifikansi menunjukkan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi atau hubungan yang positif dan signifikan antara e-procurement (variabel x) secara parsial terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa (variabel Y), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki (ada) pengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 3. Hasil Uji Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.074	4.617		2.832	.007		
	TOTAL_X	1.041	.184	.644	5.651	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y (efektivitas pengadaan barang/jasa)

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan SPSS 22 (2024)

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Pada Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), didapatkan bahwa:

1. Hasil perhitungannya Uji Validitas butir item angket variabel X (e-Procurement) dan variabel Y (efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah) memiliki nilai $Sig. < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan valid.
2. Hasil perhitungan uji reliabilitas *Cronbach's Alpha* dari variabel X (e-procurement) adalah $0,779 > 0,6$ dan variabel Y (efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah) $0,860 > 0,6$. Karena nilainya lebih besar dari $0,6$, maka kedua variabel dapat dinyatakan reliabel.
3. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu $0,200 > 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal, Dimana asumsi dan persyaratan normalitas dalam model regresi terpenuhi.
4. Hasil uji Auto Korelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan *Runs Test* dan diperoleh hasil $0,018 < 0,05$ dan dapat dinyatakan bahwa melalui uji ini tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

5. Uji heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan analisis *scatter plot*, yaitu dengan melihat pola pada grafik apakah menyebar atau membentuk pola tertentu. Hasil menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heterokedastisitas, karena pola titik-titik pada grafik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.
6. Hasil uji koefisien determinasi nilai *R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,415, yang berarti bahwa nilai determinasi apabila di persenkan berada pada nilai 41,5% nilai variabel *e-procurement* yang dapat dijelaskan sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan atau tidak termasuk dalam pembahasan ini.
7. Pada pengujian hipotesis, dilakukan uji t (parsial) dengan ketentuan nilai *sig.*<0,05. Berdasarkan pengolahan data melalui SPSS 22 diperoleh nilai signifikansi variabel X (*e-procurement*) terhadap variabel Y (efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah) yaitu $0,000 < 0,005$ yang berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa Variabel X secara parsial memiliki (ada) pengaruh terhadap Variabel Y.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berpedoman pada ketentuan nilai uji signifikansi bahwa *sig.*< 0,05 maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui uji t nilai signifikansi menunjukkan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi atau hubungan yang positif dan signifikan antara *e-procurement* (variabel x) secara parsial terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa (variabel Y), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi melalui SPSS 22 bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,415 artinya bahwa 41,5% nilai variabel X (*e-procurement*) yang dapat di jelaskan, sedangkan sisanya sebesar 58,8% tidak dapat dijelaskan.

Dari hasil penelitian Pengaruh *e-Procurement* Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar tidak ada paket yang menumpuk dan membuat perencanaan waktu yang tepat dalam penyelesaian dokumen melalui *e-procurement*, sehingga sebelum mencapai tanggal tenggat waktu yang ditetapkan semua paket bisa dinaikkan.

2. Disarankan untuk melakukan penambahan sumber daya manusia yang berpotensi yang sesuai dengan rekomendasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk mendukung efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*. Vol 3 No 1.
- Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
- Tanesia, R. K. (2018). Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Secara Tradisional Dan Elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(4), 247–254.

(wajib menggunakan **Meritaj** dengan **APA**, (Referensi artikel min 15 jurnal dengan 10 tahun terakhir)

Cara Penulisan Daftar Pustakan dari semua sumber kutipan yang terdapat dalam isi makalah Nama Penulis di depan , dan di lanjutkan dengan tahun, dengan diberikan nama baca koma (Judulyang di miringnama, jurnal, vol. edisi, dan diakhiri dengan tanda baca titik (.), kota, dan ds

Adisasmita, Rahardjo, 2005, *Dasar Ekonomi Mikro* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Daeli, Redaksi MA, 2018, *Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten dan Kota di Kepulauan* Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Medan. (Skripsi tidak diterbitkan).

Hutabara, Dame Esther M., 2015, *Faktor yang Memengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah STIPRON Nomor 1 Oktober.

Kuncoro, Mudraji, 2004, *Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.

Maipita, Indra, 2019, *Menyukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan di Kabupaten STIM YKPN*.

Purba, Elvis F., 2012, *Tipologi Daerah dan Identifikasi Sektor Daerah Kawasan Dataran Tinggi Toba Tahun 2010*. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.

Purba, Elvis F., 2014, *Tipologi Pertumbuhan Kabupaten dan Kota Daerah Pantai Timur, Pantai Pegunungan Provinsi Sumatera Utara*. Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.

Purba, Elvis F., Tobing, Juliana L., dan Hutabara, Dame Esther, 2012, *Ekonomi Regional*. Universitas HKBP Nommensen.

Purba, Elvis F. dan Novita, Ketimpangan, 2019, *Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Sejak Era Otonomi Tahun Pertama Era Masyarakat Ekonomi ASEA (MEAS): Analisis 27 Tahun*. Medan: Juni 2019.

Purba, Elvis F. dan Siregar, Ayu Hanjaya, 2019, *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.

Purba, Elvis F., 2012, *Pengaruh Pembangunan Antardaerah Wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, dan Provinsi Sumatera Utara*. Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi, UIH. Juli.

Sjafrizal, 2000, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Susanti, Hera; Ikhsan, Moh. dan Nidyatti, 2000, *Makroekonomi*. Kedua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tambunan, Tulus, 2001, *Transisi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Fakta*. Salemba Empat.

Todaro, Michael P., 1999, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Widodo, Tri, 2000, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Sumber Internet

<https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Sumber-Pimpinan-DPRD-Andatangi-KURPAS-PD-Anggaran-2020.pdf> diakses tanggal 13 agustus 2021.